

# TINJAUAN KRITIS HASIL KEPUTUSAN *BAHŠ AL-MASĀIL AL-DĪNIYYAH AL-MAUDŪ'YYAH* MUKTAMAR NU XXX TENTANG NU DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Syamsul Maarif

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara

---

## ***Abstract***

*This study was conducted to dig deeper into the democratic discourse that was the result of Bahtsul Masail Diniyah Mawdhuiyah's decision at the XXX NU Congress in PP. Lirboyo, Kediri, East Java, 1999. In this study, the author uses Van Dijk's critical discourse analysis theory. There are three important elements in analyzing critical discourse, namely text, social conditions, and social contexts.*

*This study can be concluded that NU is a religious organization that appreciates or accepts democracy in Indonesia. For NU, democracy is translated as an order that regulates relations between the state and the people based on universal values, namely equality, freedom and pluralism. These values are values that are taught by Islam to realize mercy for all nature. Therefore, NU considers democracy to be in line with the values of Islamic teachings.*

---

## ***Keywords***

*Nahdlatul Ulama,  
Democracy, Baht Masail*

---

*Nahdlatul Ulama,  
Demokrasi, Bahtsul  
Masail*

---

---

## ***Abstrak***

*Kajian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait wacana demokrasi yang menjadi hasil keputusan Bahtsul Masail Diniyah Mawdhuiyah Muktamar XXX Nahdlatul Ulama (NU) di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori analisis wacana kritis Van Dijk. Ada tiga elemen penting dalam menganalisis wacana kritis, yaitu teks, kondisi sosial, dan konteks sosial. Kajian ini dapat disimpulkan bahwa NU merupakan salah satu organisasi keagamaan yang berkomitmen untuk menerima sistem demokrasi di Indonesia. Bagi NU, demokrasi diterjemahkan sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat berdasarkan nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam untuk mewujudkan rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu, NU menganggap demokrasi itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.*

## Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu isu sentral dan global pada paruh kedua abad ke-20. Berbagai macam gerakan dan upaya mewujudkan kehidupan demokratis tumbuh dan berkembang di mana-mana, terutama di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Sejak perjuangan mewujudkan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mencita-citakan negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) dengan tujuan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amin Rais mengatakan, pada era pasca 1998, setidaknya ada lima persoalan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni demokratisasi, pembentukan pemerintahan yang paling bersih, penegakan keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada awal abad XXI, lima masalah tersebut akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh kepemimpinan nasional pasca 1998 (Daman, 2001: 97).

Selama pemerintahan Orde Baru, demokrasi Pancasila yang dikemas serta dikembangkan untuk memperbaiki demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung unsur non demokratik, sehingga melahirkan pemerintahan yang sementara oleh pengamat disebut sebagai otoriter-birokratik.

Pelbagai peristiwa dan gerakan perlawanan rakyat selama rezim Soeharto, terutama pada dekade 1990-an dan menjelang pemilu 1997, menunjukkan meningkatnya jeritan tuntutan kebutuhan hidup demokratis dalam tatanan masyarakat Indonesia, di samping masalah krisis ekonomi, tidak berperannya lembaga legislatif dan mandulnya organisasi politik, pemilihan umum yang menghasilkan perwakilan semu serta tidak bisa menyalurkan kehendak dan aspirasi rakyat, menyebabkan komunikasi rakyat tersumbat.

Isu politik lain yang cukup berarti dalam NU di era reformasi adalah dideklarasikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Setelah melalui jalan berliku, tatkala situasi euforia politik di era reformasi terbuka pintu kebebasan, NU kembali memprakasai pembentukan PKB yang diklaim sebagai partai penyalur aspirasi politik warga NU, sehingga secara *defacto*, NU kembali bermain politik praktis.

Bagi NU, pendirian partai merupakan keharusan bagi sejarah perpolitikan warga NU dalam konstelasi politik reformasi Indonesia. Sekalipun, langkah tersebut dianggap kontroversial dan terkesan ambigu. Karena, di satu sisi menetapkan norma Khittah 1926 sebagai barometer untuk memutuskan hubungan keorganisasian terhadap semua partai politik. Di sisi lain, PBNU merekomendasikan dengan hanya mengakui keabsahan kepada satu partai, yakni PKB.

Di samping itu, sebagaimana dalam setiap kasus politik, NU tetap mempertimbangkan aspek Fiqh secara normatif. Bagi NU adalah suatu kewajiban untuk amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu, untuk membangun pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) haruslah dilakukan secara komprehensif. Strategi perjuangan dengan melepaskan diri dari gelanggang politik praktis pada masa Orde Baru agaknya perlu dirubah. Di sini perjuangan melalui parlemen, dengan kendaraan politiknya menjadi suatu keharusan. (Hamdani Mu'in, 2001: 93).

Sebagai ormas keagamaan terbesar yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi, keterlibatan NU dalam wacana maupun gerakan reformasi menjadi suatu keniscayaan. Salah satu wacana yang dikembangkan oleh NU ketika reformasi bergulir di antaranya adalah penegakan demokrasi dan keabsahan Presiden wanita di

mata syariat yang terlihat dari hasil Munas Alim Ulama NU di Lombok pada tanggal 17 Nopember. NU mempunyai pemikiran yang cukup relevan terhadap penegakan demokrasi di Indonesia, yaitu bagi NU pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, karena itu penguatan terhadap civil society (masyarakat sipil), dalam arti bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Masyarakat sipil dirumuskan oleh NU sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan, kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan kapitalis (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-2004, 2007: 662-663).

Muktamar XXX NU yang berlangsung di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur telah banyak menghasilkan keputusan penting bagi masa depan NU. Kebijakan-kebijakan organisasi dan rekomendasi yang dirumuskan dalam muktamar tersebut mengisyaratkan bahwa NU senantiasa memiliki komitmen terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa NU memberikan perhatian yang serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang makmur, berkeadilan dan sejahtera dan menolak segala bentuk upaya disintegrasi dan propaganda yang berakibat hancurnya sistem sosial. NU bukan saja peduli terhadap kepentingan sendiri tetapi lebih dari itu, bahwa keutuhan bangsa dan negara merupakan keniscayaan dan harus diutamakan karena merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi dan kemakmuran (Materi Pertanggungjawaban Pengurus Besar NU: Mu'tamar NU ke-31, 2004:1).

Tahun 1999 adalah masa yang paling menarik untuk dikaji. Di satu sisi, karena masa itu merupakan masa transisi dengan

ditandai beralihnya masa demokrasi terpimpin menuju masa reformasi. Di sisi lain, masa reformasi dan terpilihnya Abdurrahman Wahid, merupakan dua momen penting bagi NU. Seiring terpilihnya Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Oktober 1999 menjadi Presiden, maka dengan sendirinya kran-kran demokrasi sedikit demi sedikit mulai terbuka lebar.

Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, menempatkan NU pada posisi dilematis antara mendukung Abdurrahman Wahid yang sebelumnya menjadi referensi NU sebagai Presiden, tanpa bersikap kritis sama sekali terhadap kebijakan pemerintah atau tetap memperjuangkan terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Berbeda keadaan, ketika NU berada di luar kekuasaan pada masa rezim Soeharto, NU atau orang-orang NU selalu mengkritisi dan mengontrol terhadap bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat yang berakibat tersumbatnya proses demokrasi di Indonesia (Feillard, 1999: 105-119).

NU sebagai ormas keagamaan merasa mempunyai andil besar dalam mengawal dan mewujudkan demokrasi di Indonesia. Maka, melalui forum Bahtsul Masail XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999, yang menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan masalah kehidupan bernegara, misalnya, demokrasi. NU mengambil sebuah keputusan bahwa demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka, sebenarnya demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang

pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian tentang NU dan demokrasi di Indonesia yang difokuskan dengan cara melakukan analisis wacana secara kritis terhadap keputusan Bahtsul Masail Mukhtama XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab persoalan terkait konteks yang melatarbelakangi NU mewacanakan demokrasi, dan juga metode penyampaiannya ke masyarakat.

### **Tinjauan Pustaka**

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespons dan memberikan solusi atas problematika yang muncul bagi kehidupan masyarakat. Bahtsul Masail dalam muktamar adalah salah satu forum tertinggi NU yang mempunyai otoritas tertinggi untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masail al-Di'niyyah Waqi'iyah* maupun *Mawdu'iyah*. Oleh karena itu, melalui forum ini dihasilkan sebuah keputusan dari kesepakatan hukum yang dipercayai menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan bagi masyarakat umum khususnya warga NU.

Analisis wacana kritis, menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Analisis bahasa tidak hanya menggambarkan dari aspek kebahasaan semata, namun juga menghubungkannya dengan konteks. Arti konteks di sini adalah bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu, termasuk praktek kekuasaan. (Eriyanto, 2001: 7). Menurut Munawar (2007: 120), Pendekatan analisis wacana kritis merupakan pendekatan interdisipliner terhadap teks, yang memandang teks adalah bentuk dari gejala sosial.

Analisis wacana kritis mempunyai lima karakter yang harus diperhatikan, yaitu: *pertama*, tindakan, bahwa wacana dipahami

sebagai bentuk interaksi. *Kedua*, konteks, bahwa analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. *Ketiga*, historis bahwa dengan menempatkan wacana dalam konteks tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting agar bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. *Keempat*, kekuasaan, bahwa setiap sesuatu yang muncul dalam bentuk teks atau apa pun tidak dipandang sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. *Kelima*, ideologi bahwa teks, percakapan dan lain sebagainya adalah bentuk dari praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2001: 8-14).

Banyak pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana kritis, namun yang menjadi kerangka ( pijakan) penelitian ini adalah pendekatan kognisi sosial dengan tokoh utamanya Van Dijk. Pendekatan ini menganggap faktor kognisi merupakan elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan wacana itu diproduksi. proses produksi itu disebut sebagai kognisi sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk dapat menangkap makna yang terdapat dalam berikutan konteks yang melingkupi variabel yang diteliti. Adapun obyek penelitian ini difokuskan pada analisis wacana kritis terhadap hasil keputusan bahtsul masail dalam muktamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan

dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai upaya penelitian melalui dokumen dan atau buku-buku literatur sebagai data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual (Bachtiar, 1997: 43).

Disamping itu, juga dengan menggunakan teknik wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian yang sering kali tidak ditemukan secara tertulis dalam literatur, atau sekalipun ada tidak dilaporkan secara lengkap.

Kemudian untuk mendapatkan sampai kepada jawaban atas persoalan mendasar dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis wacana yang dikembangkan oleh Van Dijk yang sering disebut sebagai kognisi sosial (Sobur, 2004: 73). Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari teori analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis (Eriyanto, 2001: 224).

Dimensi teks yang akan diteliti adalah struktur dari teks yang dapat dianalisis secara linguistik. Dimensi kognisi sosial untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu atau kelompok pembuat teks. Sedangkan konteks melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Ketiga dimensi ini harus dilakukan bersama-sama dan bersifat integral (Eriyanto, 2001: 225).

#### **Hasil Keputusan Bahtsul Masail dalam Mukhtamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Tahun 1999**

Adapun hasil dari bahtsul masail tersebut dapat diperincikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Respons Islam terhadap Demokrasi
  - a. Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai perang dunia II.
  - b. Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme.
2. Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*.
3. Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku.
4. Pemerintahan dalam suatu negara merupakan sunnah Allah yang mesti terwujud secara *syar'iy* maupun *'aqliy* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

#### **Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail dalam Mukhtamar NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Tahun 1999.**

Van Dijk (Eriyanto, 2001: 226), dalam menganalisis sebuah teks melalui tiga tahapan, yaitu: *pertama*, struktur makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. *Kedua*, superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian

<sup>1</sup> Lihat lebih jauh dalam Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan

Mu'tamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1926-2004 M, hlm 657-683

teks tersusun ke dalam suatu berita secara utuh. *Ketiga*, struktur mikro. Hal ini merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni, kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Adapun, ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya.

Analisis pertama, penulis menentukan struktur makro terlebih dahulu. Adapun struktur makro pada teks keputusan tersebut adalah Islam khususnya NU mendukung demokrasi. NU memiliki anggapan bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Karena pada prinsipnya demokrasi merupakan hubungan antara negara dan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan dengan didasarkan atas kontrak sosial. Di samping itu, ajaran Islam juga mengandung nilai-nilai yang diperjuangkan oleh demokrasi. Nilai-nilai tersebut adalah musyawarah, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

Analisis penulis menganggap bahwa NU mendukung demokrasi. Hal ini juga diperkuat oleh adanya subtopik dalam teks keputusan tersebut tentang bagaimana NU melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sipil, Ahlussunnah Wal Jamah dan perkembangan sosial budaya, Islam dan kesetaraan gender, pemulihan perekonomian nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat, acuan moral untuk menegakan keadilan dan mencegah KKN.

Subtopik dalam teks tersebut merupakan faktor penunjang tegaknya demokrasi. Pengembangan demokrasi sangat membutuhkan pengutan terhadap basis sosial (masyarakat sipil) yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dengan menjunjung kesetaraan, kebebasan, terdapat saling kepercayaan, kesukarelaan dan persaudaraan. Sebagai metode pemahaman dan pemikiran

keagamaan yang fitri, Ahlussunnah Wal Jamaah mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan peradaban, kebudayaan dan tradisi yang konstruktif serta mencegah perubahan yang bersifat merusak atas dasar prinsip moralitas keagamaan dan kemanusiaan.

Analisis tahap kedua, yaitu menganalisis teks hasil keputusan bahtsul masail, dimana penulis menentukan superstruktur dengan cara menampilkan skema hasil keputusan tersebut, sebagaimana paparan penulis pada pembahasan sebelumnya.

Analisis tahap ketiga adalah menentukan struktur mikro yang terbagi menjadi empat elemen, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik (Sobur, 2004: 74). Adapun elemen semantik pada teks hasil keputusan tersebut, yaitu Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dilihat dari prinsip-prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Dengan adanya latarbelakang di atas, maka makna yang tersembunyi yang ingin disampaikan adalah NU menerima demokrasi.

Elemen kedua yaitu menentukan sintaksis pada teks hasil keputusan tersebut, yaitu dengan melihat pada prinsip-prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Sintaksis teks tersebut berbentuk koherensi kondisional yang ditandai dengan pemakaian anak kalimat

sebagai penjelas yang menunjukkan adanya hubungan antara demokrasi dengan Islam.

Koherensi tersebut memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Dengan kata lain, koherensi kondisional ini sebagai upaya untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada khalayak pembaca agar bisa mengerti apa yang dimaksud dalam teks ini (Eriyanto, 2001: 246). Di samping itu, dalam teks hasil keputusan tersebut menampilkan atau menggunakan kata ganti 'kita'. Kata ganti ini, mempunyai implikasi merangkul dukungan dan menghilangkan oposisi yang ada. Dalam hal ini, Apa yang menjadi sikap NU seolah-olah menjadi sikap khalayak. Pemakaian kata ganti tersebut dalam teks keputusan tersebut menciptakan perasaan bersama di antara NU dan khalayak. Dengan kata lain, tidak ada batas antara NU dengan khalayak.

Kemudian elemen retorik dalam teks hasil keputusan tersebut, di antaranya menyetir ayat suci al-Qur'an surat al-Nisa': 58 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim yang dipakai untuk memperkuat pesan bahwa demokrasi sebenarnya sejalan dengan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan.

### Simpulan

Hasil dari kajian ini dapat diambil kesimpulan bahwa NU merupakan salah satu organisasi keagamaan yang memberikan apresiasi atau menerima demokrasi di Indonesia. Bagi NU, demokrasi diterjemahkan sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat berdasarkan nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam untuk mewujudkan rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu, NU menganggap demokrasi itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, 2004, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya Bekerja Sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Adnan, Abdul Basit, 1982, *Kemelut di NU antara Kyai dan Politisi*, Sala: Mayasari.
- Ahmad, Munawar, 2007, *Merunut Pemikiran Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis Sebagai Alternatif Metodologi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Ahmad, Muhajir, 2007, *Idham Khalid: Guru Politik Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Jakarta: YIIS.
- Anam, Choirul, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdah al-'Ulamā'*, Sala: Jatayu.
- Asmawi, 1999, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Azis. M. Amin, dkk., 1993, *Agama Demokrasi, dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia.
- Azra, Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Budiarjo, Miriam, 1998a, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Obor Indonesia,
- , 1998b, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung: Mizan.
- , 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Budiman, Arif, 1996, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia.
- Bachtiar, Wardi, 1997, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Daman, Rozikin, 2001, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media.
- Dharwis, Ellyasa, 1995, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto, 2003, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS.
- , 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LkiS.
- , 2000, *Kekuasaan Otoriter: dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni (Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto)*, Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Effendy, Bahtiar, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Feilard, Andree, 1999, *NU vis-a-vis Negara*, Yogyakarta: LkiS.
- Fatah, Eep Saefulloh, 2000, *Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Fatah, Munawir Abdul, 2006, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Gaffar, Affan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Karim, A., 1999, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Lkis.
- Hardiman, F. Budi, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haidar, Ali, 1998, *NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Hamdani, Muin, 2001, *Tradisi Fiqh dalam Wacana Politik NU Era Reformasi Tahun 1998-1999*. Tesis IAIN Walisongo.
- Haris, Syamsuddin, 1999, *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Hakim, Lukman, 2004, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Helmy, Ario, 2009, *Biografi K.H. Zainul Arifin: Berdzikir Menyesiasi Angin*, Jakarta: LTN NU
- Hidayat, N., 2007, *di Bawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Perjuangan Pendudukan Jepang di Indonesia, 1942-1945*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Ida, Laode, 1996, *Anatomi Konflik NU, Elite Islam dan Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.
- — — — —, 1999, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jalil, Matori Abdul, 1999, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Grasindo.
- J.A. Denny, 2006, *Demokrasi Indonesia: Visi dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Karim, Rusli, M., 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Karim, A. Gaffar, LKiS, 1995, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Kuntowijoyo, 1994, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtarom H.M., 2005, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisional Islam*, Cet., 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholis, 1999, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina.
- , 1998, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.



- Malik, Dedy Djameluddin, 1992, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, Bandung.
- Marijan, Kacung, 1992, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah*, Jakarta: Erlangga.
- Masdar, Mas'udi F. Dkk, 2009, *Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Sekretaria Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Masdar, Umaruddin, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Miri, Djameluddin, Penerjemah, 2007, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas dan Konbes Nahdah al-'Ulamā' (1926-2004)*, Surabaya: LTN NU Bekerja Sama dengan Khalista.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Dedy, 2001, *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muzadi, Abdul Muchit, 2006, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista.
- Noer, Deliar, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1966*, Bandung: Mizan.
- Rais, Amin, 1986, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3S.
- Romli, Lili, 2006, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, Alex, 2004, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sofyan, Muhammad, 1999, *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sudiby, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Zudi, 2007, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Semardjan, Selo, Editor, 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Franz Magnes, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia.
- , 1988, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Thaha, Idris, 2005, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M.Amien Rais*, Jakarta: TERAJU.
- Ulum, Bahrul, 2002, *Bodohnya NU Apa NU dibodohi?* Yogyakarta: ar-Ruzz Press.
- Wahid, Marzuki, dkk., 1999, *Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Mu'tamar Cipasung (1994) ke Mu'tamar Kediri (1999)*, Jakarta: Harian Kompas Bekerja Sama dengan Lakpesdam NU.
- Wahid, Marzuki, 1999, *Geger di Rebulik NU*, Jakarta: Kompas-Lakpesdam NU,
- Wahid, Abdurrahman, 1998, *Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, Yogyakarta: LkiS.
- , 1999, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Rosdakarya.
- , 1984, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Dharma Agung.

- Zahro, Ahmad, 2004, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS.
- Zuhri, Saifuddin, 2001, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Yogyakarta: PT. LkiS

